



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 20 Maret 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : BUMN/BUMD
LEMBAGA : PT PELABUHAN INDONESIA (PERSERO)
UNIT KERJA : DIREKTUR PENGELOLA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : FAHRUS SALAM
2. Jabatan : GROUP HEAD MANAJEMEN PELANGGAN
3. NHK : 259747

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN	Rp.	5.205.000.000
1. Tanah dan Bangunan Seluas 83 m2/45 m2 di KAB / KOTA KOTA SURABAYA , HASIL SENDIRI Rp. 855.000.000		
2. Tanah dan Bangunan Seluas 101 m2/60 m2 di KAB / KOTA KOTA SURABAYA , HASIL SENDIRI Rp. 875.000.000		
3. Tanah dan Bangunan Seluas 85 m2/45 m2 di KAB / KOTA GRESIK, HASIL SENDIRI Rp. 600.000.000		
4. Tanah dan Bangunan Seluas 110 m2/60 m2 di KAB / KOTA KOTA SURABAYA , HASIL SENDIRI Rp. 800.000.000		
5. Tanah dan Bangunan Seluas 355 m2/300 m2 di KAB / KOTA KOTA SURABAYA , HASIL SENDIRI Rp. 1.675.000.000		
6. Tanah Seluas 175 m2 di KAB / KOTA PAMEKASAN, HASIL SENDIRI Rp. 200.000.000		
7. Tanah Seluas 204 m2 di KAB / KOTA PAMEKASAN, HASIL SENDIRI Rp. 200.000.000		
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN	Rp.	419.000.000
1. MOBIL, TOYOTA INNOVA VENTURER Tahun 2021, HASIL SENDIRI Rp. 419.000.000		
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	75.000.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	861.400.000



F. HARTA LAINNYA

Sub Total

Rp.

Rp.

6.560.400.000

III. HUTANG

Rp.

186.133.044

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp.

6.374.266.956

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.